

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abudllah, R. (2002). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Asshidique, J. (2013). *Menegakan Etika Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Rajawali Press.

Astarini, D. R. (2013). *Media Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: Alumni.

Atmosudirjo, P. (1984). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Basah, S. (1998). *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*. Jakarta: Rajawali Pres.

CFG. Sunaryati, H. (1988). *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta.

Dicey, A. (2007). *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusamedia.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Harahap, Z. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hartono, S. (2006). *Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*. Bandung: Alumni.
- HR, R. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- M.Friedman, L. (1969). *The Legal System : A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- M.Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- M.Hadjon, P. (1993). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- MD, M. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

- MD, S. M. (1987). *Pokok Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Minamo, N. B. (2010). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Muchsan. (2007). *Sistem Pengawasan Terhadap Perbutan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty. Jakarta: Liberty.
- Notohamidjojo, O. (1970). *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Notohamidjojo, O. (1970). *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Satya, T. (2014). *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Press.
- Soedibyo, S. V. (1992). *Pokok- Pokok Peradilan Tata Usaha Negara* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metode penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indah.
- Sudrajat, T. (2017). *Hukum Birokrasi Pemerintah Jabatan dan Wewenang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Surbakti, R. (2002). *Perubahan UUD 1945 Dalam Prespektif Politik*. Yogyakarta:

AIPI.

Tjitrosoedibio, R. S. (1971). *Kamus Hukum*. Jakarta: Prada.

Utrecht, E. (1986). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Suarabaya: Tinta Mas.

Wiyono, R. (2013). *Menegakan Hukum Acara Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar

Grafika.

Yunus, B. M. (1980). *Intisari Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.

Yuslim. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Ilmiah :

dkk, H. M. (2017). Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur

Bupati dan Walikota. *USU Law Journal*, hlm 160.

Harun, R. (2016). Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum. *Jurnal Konstitusi*, hlm 6.

Jamil. (2019). Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dalam Perspektif

Konstruksi Hukumnya. *Perspektif, Volume 24 Nomor 3 Tahun 2019*, hlm 190.

Maulana iHasun, A. K. (2018). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan umum di Indonesia.

Jurnal Media Hukum dan Peradilan, hlm 2.

Syafrudin, A. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab. *Jurnal Pro Justisia*, 22.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

